

Nama : Khoirun Nisa

NPM : 2313031005

Kelas : A

Case Study Pertemuan 11

Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya

Provinsi Nusantara Raya memiliki jumlah penduduk sekitar 8 juta jiwa dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 22% dari APBD. Secara normatif, angka ini telah memenuhi amanat konstitusi mengenai minimal 20% anggaran pendidikan. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa skor literasi dan numerasi siswa masih berada di bawah rata-rata nasional, kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah kota dan desa masih tinggi, distribusi guru belum merata, serta infrastruktur digital sekolah masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan semata-mata besarnya anggaran, melainkan efisiensi penggunaan, ketepatan alokasi, dan efektivitas kebijakan pembiayaan pendidikan.

1. Analisis Struktur Pengeluaran

Struktur pengeluaran pendidikan di Provinsi Nusantara Raya menunjukkan dominasi belanja rutin, terutama untuk gaji dan tunjangan guru. Sebanyak 68% anggaran pendidikan digunakan untuk belanja tersebut. Dalam perspektif ekonomi pendidikan, belanja guru memang merupakan investasi penting karena guru merupakan faktor utama dalam proses pembelajaran. Namun, proporsi yang terlalu besar dapat mengurangi ruang fiskal untuk program peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses, dan inovasi pendidikan.

Tabel 1. Sturuktur Belanja Pendidikan Saat Ini

Komponen Belanja	Persentase
Gaji dan tunjangan guru	68%
Infrastruktur	12%
Program bantuan siswa	8%
Administrasi dan lainnya	12%
Total	100%

Meskipun porsi anggaran untuk guru cukup besar, hasil pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang sebanding. Hal ini menunjukkan adanya persoalan efisiensi alokatif. Permasalahan utama terlihat pada distribusi guru yang tidak merata. Sekolah di wilayah kota mengalami kelebihan guru, sedangkan sekolah di daerah terpencil justru masih kekurangan. Artinya, masalahnya bukan hanya besarnya dana, tetapi bagaimana sumber daya tersebut didistribusikan.

Selain itu, alokasi 12% untuk administrasi tergolong cukup tinggi. Dalam praktik pengelolaan pendidikan modern, beban administrasi yang terlalu besar sering kali mengurangi ruang anggaran untuk kegiatan yang berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran. Sementara itu, program bantuan siswa hanya memperoleh 8%, padahal dukungan finansial sangat penting untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok miskin dan daerah tertinggal.

Berdasarkan kondisi tersebut, bagian yang perlu direalokasi adalah belanja administrasi dan sebagian belanja rutin yang dapat dioptimalkan melalui redistribusi guru dan efisiensi birokrasi.

Tabel 2. Rekomendasi Realokasi Struktur Belanja

Komponen Belanja	Saat Ini	Rekomendasi
Gaji dan tunjangan guru	68%	58–60%
Infrastruktur dan digitalisasi	12%	18–20%
Program bantuan siswa	8%	12–14%
Administrasi dan lainnya	12%	6–8%

Reorientasi struktur belanja tersebut bertujuan agar pembiayaan pendidikan tidak hanya berfokus pada belanja rutin, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan kesempatan, dan pembangunan kapasitas jangka panjang.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

Saat ini pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya masih sangat bergantung pada pemerintah daerah melalui APBD. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu sumber pembiayaan menimbulkan beberapa risiko. Pertama, fleksibilitas fiskal daerah menjadi terbatas. Kedua,

ketika terjadi tekanan anggaran atau perubahan prioritas pembangunan, program pendidikan dapat terdampak secara langsung.

Dalam teori ekonomi publik, pendidikan termasuk barang publik yang menghasilkan manfaat sosial jangka panjang. Oleh sebab itu, pemerintah tetap harus menjadi aktor utama dalam pembiayaan pendidikan. Namun demikian, keterlibatan pemerintah tidak berarti seluruh pembiayaan harus ditanggung sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pelibatan sektor swasta dan pembiayaan alternatif menjadi relevan.

Tabel 3. Model Diversifikasi Pembiayaan Pendidikan

Sumber Pembiayaan	Bentuk Keterlibatan	Fokus Pemanfaatan
APBD Provinsi	Pembiayaan utama	Gaji guru, bantuan siswa, operasional
Public-Private Partnership (PPP)	Kerja sama pemerintah dan swasta	Infrastruktur digital, internet sekolah
CSR perusahaan	Dukungan sosial pendidikan	Beasiswa, perangkat belajar, pelatihan guru
Matching grant	Dana pendamping pemerintah	Program inovasi pendidikan daerah
Dana abadi pendidikan daerah	Investasi jangka panjang	Program mutu pendidikan berkelanjutan

Model yang paling realistis adalah public-private partnership (PPP), khususnya untuk pengembangan infrastruktur digital. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi atau penyedia teknologi untuk pembangunan jaringan internet sekolah, penyediaan perangkat digital, serta penguatan sistem pembelajaran berbasis teknologi.

Selain itu, skema matching grant dapat mendorong partisipasi sektor swasta tanpa mengurangi akuntabilitas publik. Dalam skema ini, pemerintah menyediakan dana pendamping bagi kontribusi swasta, filantropi, maupun komunitas sosial pendidikan.

Dengan demikian, pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya memang masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah. Diversifikasi sumber pembiayaan diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan fiskal dan memperluas ruang inovasi kebijakan.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

Negara-negara anggota OECD telah banyak menerapkan reformasi pembiayaan pendidikan yang lebih berorientasi pada hasil belajar dan pemerataan. Beberapa elemen dinilai cukup realistis untuk diadopsi di Nusantara Raya.

Tabel 4. Praktik OECD yang Relevan

Praktik OECD	Relevansi bagi Nusantara Raya
Performance-based budgeting	Anggaran dikaitkan dengan hasil belajar dan pemerataan
Alokasi berbasis kebutuhan siswa	Dana lebih besar untuk sekolah tertinggal dan daerah terpencil
Prioritas peningkatan kualitas guru	Pengembangan profesional guru berkelanjutan
Evaluasi berbasis data	Keputusan anggaran didasarkan pada data capaian pendidikan

Performance-based budgeting penting diterapkan agar anggaran pendidikan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari hasil yang dicapai. Indikator seperti peningkatan literasi, numerasi, pemerataan distribusi guru, dan peningkatan akses digital dapat dijadikan dasar alokasi.

Pendekatan alokasi berbasis kebutuhan siswa juga sangat relevan. Sekolah dengan tingkat kemiskinan tinggi, akses geografis sulit, atau capaian belajar rendah seharusnya memperoleh dukungan yang lebih besar.

Namun, implementasi di Indonesia menghadapi beberapa tantangan.

Tabel 5. Tantangan Implementasi di Indonesia

Tantangan	Dampak
Kapasitas kelembagaan daerah belum merata	Kesulitan dalam perencanaan berbasis data
Data pendidikan belum terintegrasi	Pengambilan keputusan kurang akurat
Resistensi birokrasi dan politik lokal	Redistribusi guru dan anggaran terhambat
Infrastruktur digital terbatas	Pelaksanaan evaluasi dan pembelajaran digital kurang optimal

Karena itu, adopsi praktik OECD perlu dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi kelembagaan Indonesia.

4. Rancangan Reformasi Pembiayaan Pendidikan 5 Tahun

A. Perubahan Struktur Belanja

Target utama reformasi adalah menjadikan belanja pendidikan lebih produktif, efisien, dan berorientasi pada kualitas hasil belajar.

Tabel 6. Target Struktur Belanja Tahun ke-5

Komponen Belanja	Saat Ini	Target Tahun ke-5
Gaji dan tunjangan guru	68%	58%
Infrastruktur dan digitalisasi	12%	20%
Program bantuan siswa	8%	14%
Administrasi dan lainnya	12%	8%

B. Strategi Peningkatan Kualitas Guru

Peningkatan kualitas guru menjadi prioritas utama reformasi.

Tabel 7. Tahapan Reformasi Guru

Tahap	Program
Tahun 1–2	Pemetaan kebutuhan guru dan redistribusi wilayah
Tahun 2–4	Pelatihan profesional berkelanjutan minimal 40 jam per tahun
Tahun 3–5	Insentif khusus untuk guru daerah terpencil

Materi pelatihan difokuskan pada penguatan literasi, numerasi, pedagogi modern, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran.

C. Digitalisasi Sekolah

Digitalisasi dilakukan secara bertahap agar kesenjangan antara sekolah kota dan desa dapat dikurangi.

Tabel 8. Tahapan Digitalisasi Sekolah

Tahun	Program
Tahun 1	Pemetaan kondisi infrastruktur digital seluruh sekolah

Tahun 2	Prioritas pembangunan akses internet sekolah terpencil
Tahun 3	Pengadaan perangkat pembelajaran digital dasar
Tahun 4	Pengembangan platform pembelajaran digital dan pelatihan guru
Tahun 5	Integrasi data sekolah dan manajemen anggaran daerah

D. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Reformasi pembiayaan pendidikan memerlukan sistem monitoring berbasis data agar kebijakan dapat dievaluasi secara berkala.

Tabel 9. Indikator Monitoring dan Evaluasi

Dimensi	Indikator	Target Tahun ke-5
Kualitas pembelajaran	Skor literasi dan numerasi	Di atas rata-rata nasional
Pemerataan	Ketimpangan sekolah kota–desa	Turun 30%
Efisiensi	Rasio output terhadap input anggaran	Meningkat 20–25%
Digitalisasi	Persentase sekolah terkoneksi internet	95%
Kualitas guru	Guru aktif mengikuti pelatihan	90%

Monitoring dilakukan pada tiga level:

- a. Makro: evaluasi tahunan di tingkat provinsi
- b. Meso: monitoring semesteran di tingkat kabupaten/kota
- c. Mikro: evaluasi rutin di tingkat sekolah

Kesimpulan

Permasalahan utama pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya bukan terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada struktur alokasi yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Dominasi belanja rutin, distribusi guru yang belum merata, rendahnya dukungan bagi siswa rentan, serta keterbatasan infrastruktur digital menjadi faktor utama yang menyebabkan capaian pendidikan masih belum optimal.

Oleh karena itu, reformasi pembiayaan pendidikan perlu diarahkan pada efisiensi struktur belanja, diversifikasi sumber pembiayaan, peningkatan kualitas guru, percepatan digitalisasi sekolah, serta penerapan sistem monitoring berbasis data. Apabila reformasi ini dijalankan secara konsisten selama lima tahun, maka kualitas pendidikan di Nusantara Raya berpotensi meningkat dan kesenjangan antara sekolah di wilayah kota dan desa dapat dikurangi.